

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Dayamas) BNN Tahun 2023 merupakan gambaran program kerja Dayamas BNN dalam 1 (satu) tahun mendatang yang dijabarkan dari Rencana Strategis Dayamas BNN 2020–2024 dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) BNN tahun 2023.

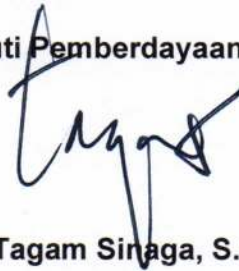
Dokumen RKT Dayamas BNN 2023 memuat sasaran, target kinerja, dan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari upaya mewujudkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Rencana kinerja program dan kegiatan pada RKT Dayamas BNN 2023 menjadi dokumen sumber bagi perumusan Perjanjian Kinerja Dayamas BNN Tahun 2023, yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di tahun 2023.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa Memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian kinerja sebagaimana yang telah kita rencanakan. Amin.

Jakarta, Januari 2023

Deputy Pemberdayaan Masyarakat



Tagam Sinaga, S.H., M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Berdasarkan hasil survei prevalensi Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan BNN dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2019, diketahui bahwa angka prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia telah mencapai 1,80% atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentang usia 15-64 tahun. Pada tahun 2021 data prevalensi tersebut mengalami kenaikan menjadi 1,95%. Kondisi ini menjadi perhatian yang lebih serius, dimana saat kegiatan pencegahan dilaksanakan secara massif tetapi prevalensi terjadi peningkatan.

Kerugian terbesar dari penyalahgunaan narkoba adalah pelemahan karakter individu yang menyebabkan melemahnya ketahanan masyarakat sebagai awal dari kehancuran bangsa. Menyikapi hal itu, Kepala BNN secara terbuka menyatakan arah dan kebijakan BNN, yaitu Perang Melawan Narkoba (War On Drugs) untuk mewujudkan Indonesia Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Wilayah Kabupaten/Kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, dan pendidikan menjadi pilihan penduduk untuk bekerja, menikmati kemakmuran, dan meningkatkan kesejahteraan. Hal itu terbukti dari hasil Sensus Kependudukan yang dilakukan oleh BPS tahun 2020, bahwa mayoritas (56,7%) penduduk di Indonesia tinggal di wilayah perkotaan.

Hasil survei BNN dan BRIN (2021) juga mengindikasikan (1) bahwa Peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan; (2) Terjadi peningkatan keterpaparan narkoba pada kelompok umur 15 – 24 dan 50 – 64 tahun, terutama di perdesaan; (3) Penduduk 15-64 tahun yang beraktivitas mengurus rumah tangga dan tidak bekerja memiliki risiko lebih besar

terpapar narkoba, baik di perkotaan maupun perdesaan. Oleh karena itu, setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus tanggap terhadap ancaman bahaya narkoba dengan melakukan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Bahaya Narkoba (KOTAN).

Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) memiliki peran penting dan strategis dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba sebagai fasilitator antarpemangku kepentingan. Penanganan permasalahan narkoba di daerah dapat diarahkan pada upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba yang dapat diintegrasikan dengan agenda perwujudan kota berkelanjutan sesuai dengan visi nasional "Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045".

Upaya pengayaan orientasi visi Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045 untuk mewujudkan kondisi atau status kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan dalam pembangunan daerah. Ruang lingkup Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi dari arah pembangunan kota.

Peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumberdaya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 hadir dalam rangka menjawab tantangan terhadap penyalahgunaan narkoba melalui rencana aksi yang terintegrasi ke seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun tingkat

daerah. Melalui Inpres tersebut, semua pemangku kepentingan dituntut untuk bersinergi dan bersatu padu dalam program P4GN.

2. Hasil Evaluasi

Pada tahun 2022 sesuai dengan sasaran program, dalam upaya Meningkatkan Ketanggapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Penyalagunaan & Peredaran Gelap Narkoba, Deputi Bidang pemberdayaan masyarakat melakukan program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan jumlah Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, dengan target 90 kab/Kota dan capaiannya 150 Kab/Kota (166,66%) dengan nilai indeks KoTAN Nasional 3,27.

Jika dibandingkan dengan hasil survey IKoTAN tahun 2021 menunjukkan Kab/Kota yang tanggap ancaman narkoba dengan target berjumlah 60 kab/kota tercapai 101 Kab/Kota (168,33%) dengan nilai indreks KOTAN Nasional 3,08, sehingga secara nasional pencapaian IKOTAN mengalami kenaikan sebesar 0,19.

Direktorat Peran Serta Masyarakat pada tahun 2022 telah memenuhi pencapaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) sebesar 3,49 dari target capaian yang telah ditentukan dalam Renstra BNN yaitu sebesar 3,20.

Dari capaian program yang menyasar lingkungan kerja, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, capaian terbesar IKP berhasil diwujudkan oleh lingkungan masyarakat mencapai skala 3,65 (Mandiri) dengan persentase kinerja sebesar 109 %. Hal itu tampak dari terlaksananya Inpres nomor 2/2020 dalam rencana Aksi P4GN TA 2020 ini, seperti: sosialisasi, tes urin, regulasi dan pembentukan satgas P4GN di lingkungannya masing-masing.

Keberhasilan program tersebut juga didukung dari keberhasilan dalam intervensi program pada 76 kawasan rawan Narkoba melalui kegiatan pemberdayaan alternatif dengan capaian kinerja sebesar 108,57%, dimana salah satu dampak keberhasilan ini juga terlaksananya urban development dan rural development, seperti keberlanjutan implementasi Grand Design Alternative Development di Aceh 2016-2025 dan bantuan CSR dari PT PLN sebanyak 6 kawasan yang diintervensi.

Beberapa faktor keberhasilan dalam capaian kinerja, antara lain : (1)

Meningkatnya pemahaman karena pembinaan teknis, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, (2) Terjalinnya komunikasi yang efektif dalam jaringan dan system kerja baik media Sosial (WA Group) dengan satuan pembinaan pusat; (3) Aktif melakukan sinergi, koordinasi, audiensi dengan Kementerian/Lembaga dan kemitraan dengan dunia usaha terkait rencana program dan kegiatan, baik secara luring maupun daring, terkait kondisi pandemi Covid-19 dan (4) penerbitan petunjuk, arahan, baik berupa penerbitan surat edaran dan buku petunjuk teknis.

Sehingga di tahun 2023 ini dengan Sasaran Program Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diharapkan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi serta khususnya Kabupaten/Kota dapat memberikan peran dalam berpartisipasi dengan P4GN yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkoba Nasional;
7. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional;
8. Peraturan Badan Narkoba Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkoba Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II

RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

DEPUTI BIDANG PEMBERYAAAN MASYARAKAT

TAHUN 2023

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Tahun 2023 sebagai gambaran rencana program kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (RIBUAN)
1	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	120 Kab/Kota	63.256.249
2	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	50.217.081
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya/Waspada" menjadi "Waspada/Siaga/Aman"	52 Kawasan Waspada/Siaga/Aman	12,038,768

BAB III

PENUTUP

Dokumen RKT Dayamas BNN Tahun 2023 menggambarkan target kinerja dan anggaran kumulatif bidang pemberdayaan masyarakat dari seluruh unit organisasi pusat dan vertikal di lingkungan BNN. RKT Dayamas BNN Tahun 2023 ini akan menjadi dokumen sumber bagi penetapan perjanjian kinerja unit organisasi di lingkungan Dayamas BNN untuk tahun 2023. Dengan demikian, dokumen RKT Dayamas BNN Tahun 2023 juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat di tahun anggaran 2023.

Demikian RKT Dayamas BNN Tahun 2023 ini disusun sebagai bagian dari kesinambungan proses mewujudkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Lampiran
Target Indikator Kinerja
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2023

Kinerja Eselon I

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatnya Ketangapsiagaan Masyarakat Terhadap Ancaman Penyalagunaan & Peredaran Gelap Narkoba	Jumlah Kabupaten/Kota Berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	120 Kab/Kota

Kinerja Eselon II Pusat

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Kesadaran & Kepedulian Masyarakat Terhadap P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,25
2	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan Dari "Bahaya/Waspada" Menjadi "Waspada/Siaga/Aman"	52 Kawasan Waspada/Siaga/Aman

Lampiran
Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Tahun 2023

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME RO
1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif (3248)	Juknis Intervensi Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (3248.AFA.001)	1 Dokumen
		Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang (3248.QDD.001)	16 Kelompok Masyarakat
		Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika (3248.BDD.001)	36 Kelompok Masyarakat
2.	Pemberdayaan Peran serta Masyarakat (3257)	Petunjuk Pelaksanaan KoTAN (3257.AFA.001)	1 NSPK
		Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (3257.QDB.001)	414 Lembaga

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output 3248.AFA.001
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran	Volume RO	Satuan
1	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2,641,760.000	1	Dokumen
	Jumlah	Rp. 2,641,760.000	1	Dokumen

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output 3248.BDD.001
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Volume RO	Satuan
1	BNNP Sumatera Utara	Rp. 130.000.000	2	Kelompok Masyarakat
2	BNN Kota Pematang Siantar	Rp. 105.200.000	1	Kelompok Masyarakat
3	BNNP Sumatera Barat	Rp. 154.174.000	1	Kelompok Masyarakat
4	BNNP Riau	Rp. 192.526.000	1	Kelompok Masyarakat
5	BNNP Jambi	Rp. 162.242.000	1	Kelompok Masyarakat
6	BNNP Sumatera Selatan	Rp. 166.410.000	1	Kelompok Masyarakat
7	BNNP Lampung	Rp. 105.200.000	1	Kelompok Masyarakat
8	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Rp. 105.200.000	1	Kelompok Masyarakat
9	BNNP Kepulauan Riau	Rp. 105.200.000	1	Kelompok Masyarakat
10	BNNP Bengkulu	Rp. 105.200.000	1	Kelompok Masyarakat
11	BNNP DKI Jakarta	Rp. 100.100.000	1	Kelompok Masyarakat
12	BNNP Banten	Rp. 117.285.000	1	Kelompok Masyarakat
13	BNNP Jawa Barat	Rp. 165.415.000	1	Kelompok Masyarakat
14	BNNP Jawa Tengah	Rp. 100.000.000	1	Kelompok Masyarakat
15	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp. 100.000.000	1	Kelompok Masyarakat
16	BNNP Jawa Timur	Rp. 187.000.000	1	Kelompok Masyarakat
17	BNNP Kalimantan Barat	Rp. 182.897.000	1	Kelompok Masyarakat
18	BNNP Kalimantan Tengah	Rp. 112.000.000	1	Kelompok Masyarakat
19	BNNP Kalimantan Selatan	Rp. 130.968.000	1	Kelompok Masyarakat
20	BNNP Kalimantan Timur	Rp. 200.000.000	1	Kelompok Masyarakat
21	BNNP Kalimantan Utara	Rp. 200.200.000	1	Kelompok Masyarakat
22	BNNP Sulawesi Utara	Rp. 182.185.000	1	Kelompok Masyarakat
23	BNNP Sulawesi Tengah	Rp. 112.000.000	1	Kelompok Masyarakat
24	BNNP Sulawesi Selatan	Rp. 112.000.000	1	Kelompok Masyarakat
25	BNNP Sulawesi Tenggara	Rp. 112.000.000	1	Kelompok Masyarakat
26	BNNP Sulawesi Barat	Rp. 112.000.000	1	Kelompok Masyarakat
27	BNNP Maluku	Rp. 112.000.000	1	Kelompok Masyarakat
28	BNNP Maluku Utara	Rp. 202.000.000	2	Kelompok Masyarakat
29	BNNP Bali	Rp. 101.500.000	1	Kelompok Masyarakat

No	Unit Kerja	Anggaran (Rp)	Volume RO	Satuan
30	BNNP Nusa Tenggara Barat	Rp. 136.676.000	1	Kelompok Masyarakat
31	BNNP Nusa Tenggara Timur	Rp. 101.500.000	1	Kelompok Masyarakat
32	BNNP Gorontalo	Rp. 182.730.000	1	Kelompok Masyarakat
33	BNNP Papua	Rp. 130.000.000	1	Kelompok Masyarakat
34	BNNP Papua Barat	Rp. 130.000.000	1	Kelompok Masyarakat
	Jumlah	Rp. 4,653,508,000	36	Kelompok Masyarakat

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output 3248.QDD.001
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran	Volume RO	Satuan
1	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 2.743.500.000	1	Kelompok Masyarakat
2	BNNP Aceh	Rp. 950.000.000	3	Kelompok Masyarakat
3	BNN Kabupaten Gayo Lues	Rp. 350.000.000	4	Kelompok Masyarakat
4	BNN Kota Lhokseumawe	Rp. 350.000.000	4	Kelompok Masyarakat
5	BNN Kabupaten Bireuen	Rp. 950.000.000	4	Kelompok Masyarakat
	Jumlah	Rp. 4.743.500.000	16	Kelompok Masyarakat

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output 3257.AFA.001
Kegiatan Pemberdayaan PSM
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran	Volume RO	Satuan
1	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 6.717.081.000	1	NSPK
	Jumlah	Rp. 6.717.081.000	1	NSPK

Lampiran
Sebaran Alokasi Anggaran dan Volume
Rincian Output 3257.QDB.001
Kegiatan Pemberdayaan PSM
Tahun 2023

No	Unit Kerja	Anggaran	Vol RO	Satuan
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	Rp262.500.000	2	Lembaga
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	Rp206.500.000	2	Lembaga
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	Rp206.500.000	2	Lembaga
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	Rp206.500.000	2	Lembaga
5	BNN KOTA Sabang	Rp206.500.000	2	Lembaga
6	BNN KOTA LHKSEUMAWE	Rp206.500.000	2	Lembaga
7	BNN KOTA LANGSA	Rp206.500.000	2	Lembaga
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	Rp206.500.000	2	Lembaga
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	Rp206.500.000	2	Lembaga
10	BNN KABUPATEN PIDIE	Rp206.500.000	2	Lembaga
11	BNN KOTA BANDA ACEH	Rp206.500.000	2	Lembaga
12	BNNP SUMATERA UTARA	Rp262.500.000	2	Lembaga
13	BNN KABUPATEN KARO	Rp211.925.000	2	Lembaga
14	BNN KOTA BINJAI	Rp211.925.000	2	Lembaga
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	Rp211.925.000	2	Lembaga
16	BNN KOTA Gunungsitoli	Rp211.925.000	2	Lembaga
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	Rp211.925.000	2	Lembaga
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	Rp211.925.000	2	Lembaga
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	Rp211.925.000	2	Lembaga
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	Rp211.925.000	2	Lembaga
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	Rp211.925.000	2	Lembaga
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	Rp211.925.000	2	Lembaga
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	Rp211.925.000	2	Lembaga
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	Rp211.925.000	2	Lembaga
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	Rp211.925.000	2	Lembaga
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	Rp211.925.000	2	Lembaga
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	Rp211.925.000	2	Lembaga
28	BNNP SUMATERA BARAT	Rp262.500.000	2	Lembaga
29	BNN KOTA Sawahlunto	Rp194.300.000	2	Lembaga
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	Rp194.300.000	2	Lembaga
31	BNN KABUPATEN SOLOK	Rp194.300.000	2	Lembaga
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	Rp194.300.000	2	Lembaga
33	BNNP RIAU	Rp252.500.000	2	Lembaga
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	Rp194.300.000	2	Lembaga
35	BNN KABUPATEN Pelalawan	Rp194.300.000	2	Lembaga
36	BNN KOTA PEKANBARU	Rp194.300.000	2	Lembaga
37	BNN KOTA DUMAI	Rp194.300.000	2	Lembaga

No	Unit Kerja	Anggaran	Vol RO	Satuan
38	BNNP JAMBI	Rp254.500.000	2	Lembaga
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Rp188.895.000	2	Lembaga
40	BNN KOTA JAMBI	Rp188.895.000	2	Lembaga
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	Rp188.895.000	2	Lembaga
42	BNNP SUMATERA SELATAN	Rp252.500.000	2	Lembaga
43	BNN KABUPATEN Ogan Ilir	Rp194.235.000	2	Lembaga
44	BNN KOTA PAGARALAM	Rp194.235.000	2	Lembaga
45	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	Rp194.235.000	2	Lembaga
46	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	Rp194.235.000	2	Lembaga
47	BNN KOTA PRABUMULIH	Rp194.235.000	2	Lembaga
48	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	Rp194.235.000	2	Lembaga
49	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	Rp194.235.000	2	Lembaga
50	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	Rp194.235.000	2	Lembaga
51	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	Rp194.235.000	2	Lembaga
52	BNNP LAMPUNG	Rp249.500.000	2	Lembaga
53	BNN KABUPATEN Tanggamus	Rp192.150.000	2	Lembaga
54	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	Rp192.150.000	2	Lembaga
55	BNN KOTA METRO	Rp192.150.000	2	Lembaga
56	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	Rp192.150.000	2	Lembaga
57	BNN KABUPATEN WAY KANAN	Rp192.150.000	2	Lembaga
58	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Rp252.500.000	2	Lembaga
59	BNN KABUPATEN Bangka	Rp210.975.000	2	Lembaga
60	BNN KOTA PANGKAL PINANG	Rp210.975.000	2	Lembaga
61	BNN KABUPATEN BELITUNG	Rp210.975.000	2	Lembaga
62	BADAN NARKOTIKA NASIONAL BANGKA SELATAN	Rp210.975.000	2	Lembaga
63	BNNP KEPULAUAN RIAU	Rp255.500.000	2	Lembaga
64	BNN KABUPATEN KARIMUN	Rp206.735.000	2	Lembaga
65	BNN KOTA BATAM	Rp206.735.000	2	Lembaga
66	BNN KOTA TANJUNG PINANG	Rp206.735.000	2	Lembaga
67	BNNP BENGKULU	Rp250.500.000	2	Lembaga
68	BNN KOTA BENGKULU	Rp196.680.000	2	Lembaga
69	BNN KABUPATEN Bengkulu Selatan	Rp200.680.000	2	Lembaga
70	BNNP DKI JAKARTA	Rp240.100.000	2	Lembaga
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	Rp222.475.000	2	Lembaga
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	Rp222.475.000	2	Lembaga
73	BNN KOTA Jakarta Utara	Rp222.475.000	2	Lembaga
74	BNNP BANTEN	Rp242.500.000	2	Lembaga
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	Rp224.875.000	2	Lembaga
76	BNN KOTA Cilegon	Rp224.875.000	2	Lembaga
77	BNN KOTA TANGERANG	Rp224.875.000	2	Lembaga
78	BNNP JAWA BARAT	Rp243.500.000	2	Lembaga

No	Unit Kerja	Anggaran	Vol RO	Satuan
79	BNN KABUPATEN BOGOR	Rp222.375.000	2	Lembaga
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	Rp222.375.000	2	Lembaga
81	BNN KOTA BANDUNG	Rp222.375.000	2	Lembaga
82	BNN KOTA CIREBON	Rp222.375.000	2	Lembaga
83	BNN KOTA CIMAHI	Rp222.375.000	2	Lembaga
84	BNN KABUPATEN Sukabumi	Rp222.375.000	2	Lembaga
85	BNN KABUPATEN GARUT	Rp222.375.000	2	Lembaga
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	Rp222.375.000	2	Lembaga
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	Rp222.375.000	2	Lembaga
88	BNN KOTA DEPOK	Rp222.375.000	2	Lembaga
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	Rp222.375.000	2	Lembaga
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp222.375.000	2	Lembaga
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	Rp222.375.000	2	Lembaga
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	Rp222.375.000	2	Lembaga
93	BNNP JAWA TENGAH	Rp249.500.000	2	Lembaga
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	Rp193.385.000	2	Lembaga
95	BNN KOTA Tegal	Rp193.385.000	2	Lembaga
96	BNN KABUPATEN Banyumas	Rp193.385.000	2	Lembaga
97	BNN KABUPATEN CILACAP	Rp193.385.000	2	Lembaga
98	BNN KABUPATEN KENDAL	Rp193.385.000	2	Lembaga
99	BNN KABUPATEN BATANG	Rp193.385.000	2	Lembaga
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	Rp193.385.000	2	Lembaga
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	Rp193.385.000	2	Lembaga
102	BNN KOTA SURAKARTA	Rp193.385.000	2	Lembaga
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	Rp249.500.000	2	Lembaga
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	Rp192.150.000	2	Lembaga
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	Rp192.150.000	2	Lembaga
106	BNN KABUPATEN BANTUL	Rp192.150.000	2	Lembaga
107	BNNP JAWA TIMUR	Rp251.500.000	2	Lembaga
108	BNN KABUPATEN Sumenep	Rp216.525.000	2	Lembaga
109	BNN KOTA Mojokerto	Rp216.525.000	2	Lembaga
110	BNN KOTA MALANG	Rp216.525.000	2	Lembaga
111	BNN KOTA BATU	Rp216.525.000	2	Lembaga
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	Rp216.525.000	2	Lembaga
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	Rp216.525.000	2	Lembaga
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	Rp216.525.000	2	Lembaga
115	BNN KOTA SURABAYA	Rp216.525.000	2	Lembaga
116	BNN KOTA KEDIRI	Rp216.525.000	2	Lembaga
117	BNN KABUPATEN MALANG	Rp216.525.000	2	Lembaga
118	BNN KABUPATEN GRESIK	Rp216.525.000	2	Lembaga
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	Rp216.525.000	2	Lembaga
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	Rp216.525.000	2	Lembaga
121	BNN KABUPATEN BLITAR	Rp216.525.000	2	Lembaga
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	Rp216.525.000	2	Lembaga

No	Unit Kerja	Anggaran	Vol RO	Satuan
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	Rp216.525.000	2	Lembaga
124	BNN KABUPATEN TUBAN	Rp216.525.000	2	Lembaga
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	Rp247.500.000	2	Lembaga
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	Rp214.245.000	2	Lembaga
127	BNN KABUPATEN SINTANG	Rp214.245.000	2	Lembaga
128	BNN KOTA PONTIANAK	Rp214.245.000	2	Lembaga
129	BNN KOTA SINGKAWANG	Rp214.245.000	2	Lembaga
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	Rp214.245.000	2	Lembaga
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	Rp214.245.000	2	Lembaga
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	Rp214.245.000	2	Lembaga
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	Rp248.500.000	2	Lembaga
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	Rp221.800.000	2	Lembaga
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	Rp221.800.000	2	Lembaga
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	Rp249.500.000	2	Lembaga
137	BNN KABUPATEN Barito Kuala	Rp196.025.000	2	Lembaga
138	BNN KOTA BANJARMASIN	Rp196.025.000	2	Lembaga
139	BNN KOTA BANJARBARU	Rp196.025.000	2	Lembaga
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	Rp196.025.000	2	Lembaga
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	Rp196.025.000	2	Lembaga
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	Rp196.025.000	2	Lembaga
143	BNN KABUPATEN TABALONG	Rp196.025.000	2	Lembaga
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Rp196.025.000	2	Lembaga
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	Rp250.500.000	2	Lembaga
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	Rp197.290.000	2	Lembaga
147	BNN KOTA SAMARINDA	Rp197.290.000	2	Lembaga
148	BNN KOTA BONTANG	Rp197.290.000	2	Lembaga
149	BNNP KALIMANTAN UTARA	Rp249.500.000	2	Lembaga
150	BNN KOTA TARAkan	Rp194.790.000	2	Lembaga
151	BNN KABUPATEN NUNUKAN	Rp194.790.000	2	Lembaga
152	BNNP SULAWESI UTARA	Rp204.500.000	2	Lembaga
153	BNN KABUPATEN Bolaang Mongondow	Rp200.150.000	2	Lembaga
154	BNN KOTA BITUNG	Rp200.150.000	2	Lembaga
155	BNN KOTA MANADO	Rp200.150.000	2	Lembaga
156	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	Rp200.150.000	2	Lembaga
157	BNNP SULAWESI TENGAH	Rp257.500.000	2	Lembaga
158	BNN KABUPATEN Banggai Kepulauan	Rp224.575.000	2	Lembaga
159	BNN KABUPATEN MOROWALI	Rp226.075.000	2	Lembaga
160	BNN KOTA PALU	Rp224.575.000	2	Lembaga
161	BNN KABUPATEN DONGGALA	Rp223.575.000	2	Lembaga
162	BNN KABUPATEN POSO	Rp229.575.000	2	Lembaga
163	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	Rp229.575.000	2	Lembaga
164	BNNP SULAWESI SELATAN	Rp253.500.000	2	Lembaga

No	Unit Kerja	Anggaran	Vol RO	Satuan
165	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	Rp208.900.000	2	Lembaga
166	BNN KABUPATEN Bone	Rp208.900.000	2	Lembaga
167	BNN KOTA PALOPO	Rp208.900.000	2	Lembaga
168	BNNP SULAWESI TENGGARA	Rp254.500.000	2	Lembaga
169	BNN KABUPATEN Muna	Rp192.025.000	2	Lembaga
170	BNN KABUPATEN KOLAKA	Rp192.025.000	2	Lembaga
171	BNN KOTA KENDARI	Rp192.025.000	2	Lembaga
172	BNN KOTA BAU-BAU	Rp192.025.000	2	Lembaga
173	BNNP SULAWESI BARAT	Rp259.500.000	2	Lembaga
174	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	Rp203.085.000	2	Lembaga
175	BNNP MALUKU	Rp258.500.000	2	Lembaga
176	BNN KABUPATEN Buru Selatan	Rp204.170.000	2	Lembaga
177	BNN KOTA TUAL	Rp204.170.000	2	Lembaga
178	BNNP MALUKU UTARA	Rp254.500.000	2	Lembaga
179	BNN KABUPATEN Pulau Morotai	Rp213.330.000	2	Lembaga
180	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	Rp213.330.000	2	Lembaga
181	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Rp213.330.000	2	Lembaga
182	BNNP BALI	Rp252.500.000	2	Lembaga
183	BNN KOTA DENPASAR	Rp222.195.000	2	Lembaga
184	BNN KABUPATEN BADUNG	Rp222.195.000	2	Lembaga
185	BNN KABUPATEN GIANJAR	Rp222.195.000	2	Lembaga
186	BNN KABUPATEN BULELENG	Rp222.195.000	2	Lembaga
187	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	Rp222.195.000	2	Lembaga
188	BNN KABUPATEN KARANGASEM	Rp222.195.000	2	Lembaga
189	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	Rp251.500.000	2	Lembaga
190	BNN KABUPATEN Bima	Rp221.400.000	2	Lembaga
191	BNN KOTA MATARAM	Rp221.400.000	2	Lembaga
192	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	Rp221.400.000	2	Lembaga
193	BNN KABUPATEN SUMBAWA	Rp221.400.000	2	Lembaga
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	Rp252.500.000	2	Lembaga
195	BNN KABUPATEN Belu	Rp220.416.000	2	Lembaga
196	BNN KOTA KUPANG	Rp220.416.000	2	Lembaga
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	Rp220.416.000	2	Lembaga
198	BNNP GORONTALO	Rp251.500.000	2	Lembaga
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	Rp190.252.000	2	Lembaga
200	BNN KOTA GORONTALO	Rp190.252.000	2	Lembaga
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	Rp190.252.000	2	Lembaga
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	Rp190.252.000	2	Lembaga
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	Rp190.252.000	2	Lembaga
204	BNNP PAPUA	Rp267.500.000	2	Lembaga
205	BNN KABUPATEN Mimika	Rp209.981.000	2	Lembaga
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	Rp209.981.000	2	Lembaga
207	BNNP PAPUA BARAT	Rp267.500.000	2	Lembaga
	Jumlah	43.500.000.000	414	Lembaga